

**PROGRAM 'RERA' DAN LIKUIDASI DIVISI BANTENG : ANALISIS  
TERHADAP KEGONCANGAN MILITER DI SUMATERA BARAT 1948 –1950**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh*

*Gelar Sarjana Pendidikan (S1)*



**Oleh:**

**NANDA PRIYONO**

**13222/2009**

**JURUSAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2014**

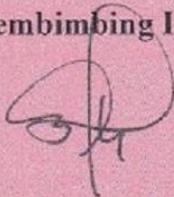
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Program Rera dan Likuidasi Divisi Banteng : Analisis Terhadap  
Kegoncangan Militer di Sumatera Barat 1948-1950  
Nama : Nanda Priyono  
Bp/NIM : 2009/13222  
Jurusan : Sejarah  
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Padang, 21 Agustus 2014

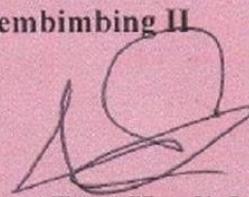
Disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. Zul Asri, M.Hum  
NIP. 196006031986021001

Pembimbing II



Drs. Etmi Hardi, M.Hum  
NIP. 196703041993031003

Ketua Jurusan



Hendra Naldi, SS. M.Hum  
NIP. 196909301996031001

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
Pada tanggal 23 Juli 2014**

**PROGRAM RERA DAN LIKUIDASI DIVISI BANTENG : ANALISIS TERHADAP  
KEGONCANGAN MILITER DI SUMATERA BARAT 1948-1950**

Nama : Nanda Priyono

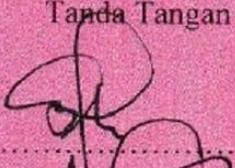
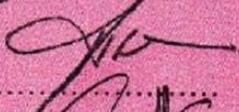
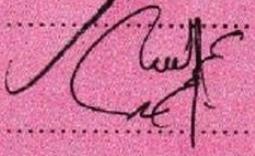
Bp/NIM : 2009/13222

Jurusan : Sejarah

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Padang, 21 Agustus 2014

Tim Penguji:

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Drs. Zul Asri, M.Hum	1. 
Sekretaris : Drs. Etmi Hardi, M.Hum	2. 
Anggota : 1. Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum	3. 
2. Hendra Naldi, SS, M.Hum	4. 
3. Abdul Salam, S.Ag, M.Hum	5. 

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di awah ini :

Nama : Nanda Priyono

NIM/BP : 13222/2009

Jurusan : Sejarah

Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Program 'Rera' dan Likuidasi Divisi Banteng : Analisis Terhadap Kegoncangan Militer di Sumatera Barat 1948-1950" adalah benar hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di Institusi UNP maupun masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 21 Agustus 2014

Diketahui Oleh

Ketua Jurusan Sejarah



Hendra Naldi, SS. M.Hum  
NIP. 196909301996031001

Saya yang Menyatakan



Nanda Priyono  
NIM. 13222/2009

## ABSTRAK

**Nanda Priyono (2009/13222). Program Rera dan Likuidasi Divisi Banteng : Analisis Terhadap Kegoncangan Militer di Sumatera Barat (1948-1950) Skripsi. Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2014**

Skripsi ini mengkaji tentang dinamika militer di Sumatera Barat dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Program Rera yang dirancang oleh pemerintah pusat dan dijalankan pada masa kabinet PM Hatta memberikan dampak yang besar bagi militer di Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang umum. *Pertama*, penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data primer diperoleh melalui penelusuran terhadap karya-karya tulis berupa memoar, autobiografi dan biografi dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam militer di Sumatera Barat pada periode tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) *Kedua*, dilakukan kritik sumber terhadap data yang telah diperoleh. *Ketiga*, melakukan analisis dan sintesis terhadap data yang ditemukan kemudian melakukan interpretasi terhadap temuan tersebut. *Keempat*, penulis memaparkan hasil penelitian dalam bentuk sebuah karya ilmiah berupa skripsi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa program Rera yang dijalankan oleh pemerintah pusat sangat mempengaruhi keadaan militer di Sumatera Barat dan memberikan dampak yang besar. Ketika terjadinya Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948, kekuatan militer di Sumatera Barat tercerai-berai dan tidak mampu memberikan perlawanan berarti terhadap gerakan militer Belanda. Kondisi menjadi semakin parah menjelang pengakuan kedaulatan dengan ditiutkan Divisi Banteng. Penciutan ini menyebabkan demobilisasi besar-besaran dan menimbulkan kekecewaan yang mendalam di Sumatera Barat. Selain pengunduran diri sebagian perwira dan ribuan prajuritnya akibat Rera, Sumatera Barat juga kehilangan Komando Utamanya. Divisi Banteng ditiutkan menjadi sebuah Brigade dengan  $\frac{1}{4}$  kekuatan jika dibandingkan dengan masa puncaknya. Setelah itu, penciutan Divisi Banteng menjadi salah satu alasan yang mendorong dilakukannya reuni Divisi Banteng tahun 1956, awal terjadinya pergolakan daerah.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Alhamdulillah dengan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “Program Rera dan Likuidasi Divisi Banteng : Analisis Terhadap Kegoncangan Kalangan Militer di Sumatera Barat (1948-1950)”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini terelialisasi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, yang pada kesempatan ini penulis meyampaikan rasa terima kasih setulusnya kepada:

1. Teristimewa ucapan terima kasih penulis pesembahkan kepada Alm ibunda tercinta yang telah sejak lama mendahului kita semua, ayahanda yang telah menanggung semua beban sehingga saya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi, untuk etek yang membiayai kuliah tahun-tahun terakhir ini dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Zul'Asri M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Etmi Hardi M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum, Bapak Hendra Naldi, S.S, M.Hum, Bapak Abdul Salam, S.Ag, M.Hum selaku penguji yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran dan perhatian untuk menguji demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Hendra Naldi, SS, M.Hum selaku pimpinan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang beserta staf pengajar

yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai selama penulis belajar di Jurusan Sejarah.

5. Jurusan Sejarah dan Fakultas Ilmu Sosial UNP yang telah membantu dalam urusan administrasi dan Gedung Juang 45 Kota Padang yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian.
6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Jurusan Sejarah Angkatan 2009 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan semua pihak yang ikut memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan kita bersama. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Padang, 23 Juli 2014

Penulis

**NANDA PRIYONO**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Tinjauan Pustaka .....	13
E. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II MILITER SUMATERA BARAT DARI 1945 -1948</b>	
A. Giyugun : unsur pembentuk BKR di Sumatera Barat .....	20
B. Reorganisasi Tahap Pertama : Dari TKR ke TRI .....	23
C. Keadaan Militer di Sumatera Barat sebelum dilaksanakannya Program Rera .....	33
<b>BAB III PROGRAM RERA DAN LIKUIDASI DIVISI BANTENG</b>	
A. Program Rera dan Kabinet Hatta .....	36
B. Pelaksanaan Kebijakan Rera.....	42
C. Penolakan Perwira Sumatera terhadap Program Rera.....	47
D. Kelambanan Komandemen Sumatera dan Pengiriman Perwira Siliwangi.....	50

E. Divisi Banteng Diciutkan .....	55
F. Demobilisasi Besar-Besaran Anggota Divisi Banteng .....	65
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

### A. Tabel Susunan Ketentaraan di Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan 1945-1949

1. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) 5 Oktober 1945 – 25 Januari 1947
2. Tentara Republik Indonesia (TRI) 25 Januari 1947 – 3 Juni 1947
3. Tentara Nasional Indonesia (TNI) 3 Juni 1948-26 Desember 1949
4. Pembagian Sub Territorium dalam Tentara Territorium Sumatera 16 Desember 1948 – 26 Desember 1949

### B. Tabel Perbandingan Perkembangan antara Divisi Banteng, Siliwangi dan Gajah

5. Perbandingan antara ketiga Divisi Tentara Indonesia dalam setiap periode perkembangan TNI berikut komandan, wilayah territorial dan kekuatannya

### C. Bagan struktur organisasi militer di Sumatera Barat dalam masing-masing periode

6. Struktur Komando BKR Sumbar/Riau
7. Divisi III TKR Banteng
8. Divisi III TRI Banteng
9. Divisi IX TNI Banteng
10. Divisi IX Banteng setelah Rera I pertengahan 1948
11. Sub Territorium V Sumatera Barat
12. Divisi IX Banteng per 21 Desember 1948
13. Brigade Banteng hasil Rasionalisasi menjelang pengakuan Kedaulatan
14. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial
15. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemerdekaan Indonesia membutuhkan perjuangan dari segenap bangsa Indonesia. Setelah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda yang ingin mengembalikan daerah jajahannya. Perjuangan ini berlangsung hampir lima tahun lamanya hingga pengakuan kedaulatan Indonesia. Usaha mempertahankan kemerdekaan ini dilakukan dengan berbagai cara oleh pihak-pihak yang terlibat. Diplomasi dan perjuangan bersenjata adalah tonggak utama perjuangan bangsa Indonesia. Jalan diplomasi ditempuh oleh tokoh-tokoh politik sedang Perjuangan bersenjata dilakukan oleh kalangan militer. Setiap perjuangan ini memiliki ciri khas tersendiri di berbagai daerah Indonesia.

Diplomasi dan perjuangan bersenjata memiliki andil yang sama dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kondisi ini tampak dari dinamika perjuangan selama kurun waktu tahun 1945-1949. Agresi militer yang dilakukan Belanda diselingi dengan perundingan dan perjanjian diantara kedua belah pihak yang bertikai. Peranan masing-masing bidang ini digambarkan dengan sangat baik oleh T.B Simatupang dalam bukunya, Laporan dari Banaran.<sup>1</sup> Langkah diplomasi tidak akan berhasil tanpa adanya perjuangan bersenjata dan perjuangan bersenjata tidak berpengaruh tanpa dukungan diplomasi.

---

<sup>1</sup> T B Simatupang. 1980. *Laporan dari Banaran : Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan*. Jakarta : PT Pembangunan.

Perjuangan bersenjata oleh kalangan militer memiliki corak tersendiri di setiap daerahnya. Salah satu daerah yang mempunyai peranan penting selama perang kemerdekaan adalah Sumatera Tengah dengan Bukittinggi sebagai ibukotanya. Kota ini pernah menjadi kedudukan dari gubernur provinsi Sumatera dan wakil presiden Indonesia dalam kurun waktu tersebut. Perjuangan bersenjata di daerah ini berperan penting ketika agresi Belanda ke II yang mendorong didirikannya PDRI. Dinamika kehidupan militer pada periode perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini kemudian berpengaruh pada perkembangan sosial dan politik di masa setelahnya.

Republik Indonesia membentuk BKR sebagai lembaga resmi yang bertugas menjaga keamanan. BKR di Sumatera Barat dibentuk pada tanggal 3 September 1945.<sup>2</sup> Seiring semakin memburuknya situasi keamanan, akibat mendaratnya tentara Sekutu (dalam hal ini, Inggris) maka dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dengan dibentuknya TKR sesuai instruksi presiden 5 Oktober 1945 maka secara resmi Indonesia memiliki tentara reguler. Untuk wilayah Sumatera Barat, para perwira eks Giyugun seperti Ismael Lengah dan Dahlan Djambek muncul sebagai pimpinan TKR.

Perkembangan politik Indonesia berpengaruh terhadap perkembangan TKR sebagai badan resmi militer di Indonesia. Seiring dengan jalannya perjuangan mempertahankan kemerdekaan, TKR bertransformasi menjadi TRI pada awal tahun 1946 dan berubah menjadi TNI pada pertengahan tahun 1947.

---

<sup>2</sup> Mestika Zed, dkk. 1998. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. Jakarta : Sinar Harapan. (hlm:25)

Perubahan yang dilakukan ini bertujuan untuk menyelaraskan serta mengoptimalkan segala bentuk perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Sayangnya, tidak semua program yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan pimpinan angkatan perang berjalan dengan baik dan mendapat respon yang baik di berbagai daerah. Kebijakan yang menjadi kontroversi dan menimbulkan pro kontra yang cukup besar adalah rasionalisasi dan reorganisasi(Rera).

Rera adalah singkatan dari reorganisasi dan rasionalisasi. Program ini adalah upaya pemerintah menyusun ulang dan menyederhanakan jumlah anggota angkatan perang Indonesia. Kekuatan militer Indonesia mulai disusun sebagaimana sebuah angkatan bersenjata yang profesional. Jumlah tentara di pulau Jawa dan Sumatera dikurangi hampir setengahnya. Pengurangan ini ditujukan agar jumlah tentara sebanding dengan luas wilayah Indonesia. Wilayah republik Indonesia menyempit setelah agresi militer Belanda. Luas daerah yang masih di pulau Jawa tidak sebanding dengan besarnya jumlah anggota angkatan perang. Dari segi ekonomi, pemerintah tidak mampu membiayai angkatan perang Indonesia yang mencapai 463.000 orang.<sup>3</sup> Sedangkan reorganisasi ditujukan untuk membentuk suatu angkatan perang yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan reorganisasi maka akan dapat dibentuk suatu angkatan perang yang profesional.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Deliar Noer. 1990. *Mohammad Hatta : Biografi Politik*. Jakarta : LP3ES. (hlm:325). Bandingkan dengan keterangan dalam Mestika Zed. 2005. *Giyugun : Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera*. Jakarta : LP3ES. (hlm:170) yang menyatakan bahwa jumlah tentara di Jawa mencapai 350.000 tentara reguler dan 470.000 anggota laskar

<sup>4</sup> Ibid..(hlm:325)

Rera adalah sebuah kebijakan yang kontroversial. Ide tentang hal ini pada awalnya berasal dari kelompok kiri dalam KNIP. Pemerintahan Indonesia waktu itu dipimpin oleh PM Amir Sjarifuddin yang juga berasal dari golongan kiri. Kelompok kiri ini bertujuan untuk merangkul angkatan perang (tentara) agar berpihak pada mereka dalam pemerintahan Indonesia. Mereka berusaha membentuk tentara seperti di Rusia dengan program pepolit, yang setelah itu diganti dengan nama Biro Perjuangan. Namun, program ini tidak dapat dilanjutkan karena Amir Sjarifuddin lengser setelah persetujuan Renville dan digantikan oleh Hatta sebagai perdana menteri. Program Rera yang dilaksanakan oleh PM Hatta mendapat tentangan dari pihak tentara itu sendiri, terutama untuk wilayah Sumatera.

Pemimpin tentara di Sumatera menilai kebijakan Rera tidak memperhatikan perbedaan keadaan diantara pulau Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu muncul banyak penolakan dari perwira komandemen Sumatera. Penolakan ini disuarakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penolakan secara langsung disuarakan pada saat Perdana Menteri M Hatta dan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel A H Nasution menjelaskan kebijakan ini di Bukittinggi pada pertengahan tahun 1948. Usaha ini dilanjutkan dengan mengirim Letkol Ismael Lengah ke Yogyakarta untuk menemui Komodor Soerjadarma terkait keadaan tentara di Sumatera.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjadarma adalah pimpinan komisi rasionalisasi di tingkat nasional yang menjalankan program Rera berdasarkan instruksi presiden

Ketika pimpinan pusat tidak menggubris protesnya, pimpinan komando tentara di Sumatera menghalang-halangi perintah dari pusat. Salah satunya lewat panglima Suhardjo Harjowardoyo dengan mengangkat Letkol Ismael Lengah sebagai Kepala Stafnya. Padahal, Hatta telah mengangkat Letkol Daan Jahja dan mengirimnya ke Bukittinggi untuk mengisi jabatan tersebut.<sup>6</sup> Pengiriman perwira Siliwangi ke Sumatera bertujuan agar memudahkan pelaksanaan perintah dari pusat. Perwira-perwira Siliwangi tentu lebih patuh menjalankan kebijakan dari A H Nasution yang juga perwira yang berasal dari Divisi yang Sama. Dengan adanya perwira-perwira Siliwangi di Komandemen Sumatera maka diharapkan kebijakan Rera dapat terlaksana dengan baik.

Sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan tersebut, beberapa perwira senior Divisi Banteng mengundurkan diri dari dinas militer. Mereka adalah panglima Divisi Banteng kedua dan Ketiga, Kolonel Ismael Lengah,<sup>7</sup> dan Kolonel Dahlan Ibrahim<sup>8</sup> serta Kepala Staf Divisi Banteng, Letkol A. Halim.<sup>9</sup> Ismael Lengah adalah salah satu pendiri BKR di Sumatera Barat di awal kemerdekaan. Kemudian menjabat sebagai panglima Divisi Banteng yang kedua. Ismael Lengah beberapa kali sempat bertentangan dengan wakil presiden Hatta terkait beberapa peristiwa. Selain kebijakan rasionalisasi militer, Lengah juga berbeda pendapat

---

<sup>6</sup> Mestika Zed. 2005. *Giyugun : Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera*. Jakarta : LP3ES. (hlm:174)

<sup>7</sup> Ismael Lengah Dipindahkan ke Yogya oleh Hatta dan tidak mendapatkan tugas serta jabatan yang jelas disana setelah penentangannya terhadap Hatta. Lihat Audrey Kahin. 2005. *Dari Pemberontakan Ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* Jakarta : YOI. (hlm:274)

<sup>8</sup> Fatimah Enar, dkk. 1978. *Sumatera Barat 1945-1950*. Padang : Grafika. (hlm:324). Lihat juga Marah Joenoes. *Mr H St. Mohammad Rasjid. Perintis Kemerdekaan, Pejuang Tangguh, Berani dan Jujur*. Riau : Cerya Riau Mandiri Printing. (hlm:122)

<sup>9</sup> Audrey Kahin. 2005. *Dari Pemberontakan Ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* Jakarta : YOI. (hlm:274)

dengan Hatta terkait penyelesaian peristiwa 3 Maret 1946.<sup>10</sup> Sebelum terjadi agresi militer Belanda ke II, Lengah ditarik ke markas besar tentara di Yogyakarta tanpa diberikan tugas yang jelas dan komando atas pasukan. Setelah pengakuan kedaulatan, Lengah mundur dari dinas militer.

Sedangkan Dahlan Ibrahim dan Abdul Halim adalah pimpinan Divisi Banteng saat berlangsungnya PDRI. Setelah gagal menghentikan campur tangan pemerintah pusat memporak-porandakan otonomi militer di daerah ini, Letkol Dahlan Ibrahim dan Letkol Abdul Halim mengundurkan diri dari dinas militer dan kembali ke kehidupan sipil.<sup>11</sup> Setelah mengundurkan diri, Dahlan Ibrahim mendirikan sebuah komite yang mengurus kembalinya pasukan gerilya ke dalam kota, bertujuan untuk mengurus masalah kesehatan dan perumahan bagi mereka serta mendapatkan pekerjaan di bidang sipil.<sup>12</sup> Sementara itu Abdul Halim(aleng) terjun ke dunia bisnis. Dalam suatu kesempatan di tahun 2000, Abdul Halim menerangkan kepada penyunting biografi St Mohammad Rasjid (Soewardi Idris) bahwa kemundurannya dari dinas militer antara lain memang karena kecewa atas pembubaran Divisi Banteng.<sup>13</sup>

Selain ketiga perwira tersebut diatas , banyak prajurit eks Divisi Banteng yang mengundurkan diri. Pengunduran diri ini membawa perubahan sangat besar dalam jumlah personil militer di Sumatera Barat. Pada pertengahan 1948, Divisi

---

<sup>10</sup> Mestika Zed. 2005. *Giyugun : Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera*. Jakarta : LP3ES. (hlm:156)

<sup>11</sup> Marah Joenoes. *Mr H St. Mohammad Rasjid. Perintis Kemerdekaan, Pejuang Tangguh, Berani dan Jujur*. Riau : Cerya Riau Mandiri Printing. (hlm:122)

<sup>12</sup> Audrey Kahin.1979. *Perjuangan Kemerdekaan : Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*. Padang : MSI Cab. Sumatera Barat. (hlm:318)

<sup>13</sup> Marah Joenoes. *Mr H St. Mohammad Rasjid. Perintis Kemerdekaan, Pejuang Tangguh, Berani dan Jujur*. Riau : Cerya Riau Mandiri Printing. (hlm:122)

Banteng berkekuatan hingga 23.000 orang yang terdiri atas enam resimen. Ketika perintah Rera dikeluarkan, jumlah ini tidak langsung ditiadakan. Pengurangan jumlah personil anggota Divisi Banteng baru dilaksanakan menjelang pengakuan kedaulatan. Komisi rasionalisasi melaksanakan mobilisasi besar-besaran. Kesatuan ini disusun kembali menjadi 4 batalyon riel dari kesatuan mobil dan satu batalyon berasal dari kompi-kompi teritorial.<sup>14</sup> Sehingga dengan formasi yang ada hanya tersisa sekitar 5.000 orang prajurit. Ini tentu sebuah fenomena yang akan mempengaruhi perkembangan sejarah di Sumatera Barat karena ketika itu mereka adalah kelompok muda yang menjadi penggerak roda kehidupan masyarakat di berbagai tingkatan.

Penelitian ini pantas untuk dilakukan disebabkan beberapa hal. *Pertama*, kajian terkait peranan kelompok militer pada taraf sejarah lokal masih kurang. Selama ini kecenderungan kajian sejarah militer berpusat pada biografi tokoh-tokoh militer dan keterlibatannya dalam peristiwa politik serta operasi-operasi militer yang dilakukannya. Kelompok militer di Sumatera Barat memiliki peran yang signifikan pada masa perang kemerdekaan Indonesia dan ketika terjadinya gerakan-gerakan daerah di dekade tahun lima puluhan. Peranan militer sebagai sebuah kelompok yang mempengaruhi dinamika sejarah di Sumatera Barat pada era perang kemerdekaan perlu dipelajari kembali karena hal inilah yang mempengaruhi sikap kelompok ini pada masa setelah pengakuan kedaulatan Indonesia.

---

<sup>14</sup> Lihat Fatimah Enar. *Sumatera Barat 1945-1949*. (hlm:325) Juga Mestika Zed, dkk. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. (hlm:121) Dan Mestika Zed. *Giyugun : Cikal bakal Tentara Nasional di Sumatera*. (hlm:189)

*Kedua*, kekecewaan kelompok militer di Sumatera Barat memiliki karakter yang berbeda dan spesifik. Rasa kecewa tersebut diwujudkan dalam bentuk pengunduran diri dari kesatuan dan menjadi rakyat sipil. Hal ini berbeda dengan gejala yang terjadi di daerah lainnya.<sup>15</sup> Di beberapa daerah, penolakan terhadap Rera muncul dalam bentuk perlawanan bersenjata atau pemberontakan. Perlawanan ini timbul dominan pada satuan TNI yang berasal dari eks laskar yang telah digabung dengan tentara ketika reorganisasi tahap awal tahun 1947. Divisi Banteng adalah satu-satunya kesatuan setingkat Divisi yang diciutkan oleh pemerintah lewat program Rera setelah berakhirnya perang kemerdekaan.

Penulisan sejarah mengenai kekecewaan kelompok militer eks Divisi Banteng seringkali dikaitkan langsung dengan peristiwa PRRI. Oleh karena itu kekecewaan yang muncul karena kebijakan Rera tidak begitu nampak. Banyak opini yang muncul bahwa gerakan daerah yang digerakkan ketika itu oleh militer adalah ekspresi yang muncul setelah pengakuan kedaulatan. Padahal kekecewaan ini berakar jauh dan telah muncul sebelum itu. Semenjak pelaksanaan kebijakan Rera pada tahun 1948 telah muncul kekecewaan tersebut. Perlawanan yang dilakukan perwira-perwira Divisi Banteng terhadap perintah dari pusat inilah yang membuat kesatuan ini berakhir tragis setelah pengakuan kedaulatan. Dengan memisahkan persoalan ini maka akan dapat ditemukan alasan awal munculnya gerakan perlawanan dari kelompok militer di Sumatera Barat anggota eks Divisi Banteng.

---

<sup>15</sup> Di banyak daerah, respon yang muncul adalah perlawanan yang sering dalam bentuk pemberontakan bersenjata seperti yang dilakukan oleh Kahar Muzakar, Andi Azis, Ibnu Hajar dan kasus Daud Bereueh di Aceh

*Ketiga*, anggota Divisi Banteng mengikuti dengan patuh kebijakan Rera seteah pengakuan kedaulatan. Menurut keputusan dari pimpinan Angkatan Perang kelompok pertama yang demobilisasi adalah kesatuan tentara pelajar. Anak-anak yang menjadi tentara di usia muda ini akan melanjutkan pendidikannya dengan biaya dari pemerintah.<sup>16</sup> Sedangkan kelompok lainnya akan diseleksi oleh komisi rasionalisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh MBAD. Banyak dari mereka yang mengundurkan diri secara sukarela padahal mempunyai kualifikasi yang baik sebagai tentara. Setelah perjuangan usai, maka banyak orang yang mulai memikirkan kehidupannya sendiri.<sup>17</sup> Pendapat ini masih harus dibuktikan karena ada faktor lain yaitu telah usainya perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

*Terakhir*, kajian yang telah ada terbatas membahas pelaksanaan Rera saja seperti karya berikut ini. Oktaviyeni MR adalah mahasiswa Jurusan Sejarah UNAND yang menulis tentang *Pelaksanaan Rekontruksi dan Rasionalisasi Dalam Bidang Militer di Sumbar 1947-1950*.<sup>18</sup> Penelitian yang hanya membahas pelaksanaan Rera saja tentu tidak bisa mengungkapkan keterkaitan program Rera dengan peristiwa-peristiwa di tahun berikutnya yang menyulut pergolakan daerah. Sedangkan Zulvia Ekawati menulis tentang *Rasionalisasi di Bidang Militer pada Masa Kabinet Hatta* dan Alfi Syukra menulis makalah yang berjudul *Rekonstruksi-Rasionalisasi dalam Bidang Militer Program Kabinet M.Hatta*

---

<sup>16</sup> SK Staf A Angkatan Darat No. 020/B / KSA / AD/ 50

<sup>17</sup> Mestika, Zed dkk. 1998. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. Jakarta : Sinar Harapan. (hlm:111)

<sup>18</sup> Oktaviyoni MR adalah mahasiswa jurusan Sejarah UNAND

*tahun 1948*.<sup>19</sup> Penelitian Alfi Syukra dan Zulvia Ekawati ini membahas program rasionalisasi ini di tingkat nasional dan dalam kerangka kebijakan kabinet Hatta. Pembahasan seperti ini terfokus pada tatanan pusat dan kurang menyentuh gejala yang terjadi di daerah-daerah.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Penelitian ini mengambil tema sejarah militer dengan menekankan kebijakan Rera dan konflik yang terjadi dalam tubuh kesatuan militernya menjelang dan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. Sebagaimana penelitian sejarah pada umumnya, permasalahan ini dibatasi secara spatial dan temporal. Secara spatial, penelitian ini dibatasi di daerah Sumatera Barat sebagai basis kedudukan Divisi Banteng.

Secara temporal, penelitian ini akan dibatasi dari tahun 1948 hingga 1950. Kurun waktu ini diambil berdasarkan pertimbangan sebagai berikut, tahun 1948 adalah titik awal dimulainya program Rera oleh pemerintah pusat yang disambut dengan pembangkangan sejumlah elit militer di Sumatera Barat. Pembangkangan ini yang menyebabkan satuan militer di daerah ini bernasib tragis setelah pengakuan kedaulatan. Sedangkan tahun 1950 dijadikan batasan akhirnya adalah karena pada tahun ini terjadi demobilisasi besar-besaran terhadap anggota Divisi IX Banteng.

---

<sup>19</sup> Alfi Syukra (1997) dan Zulvia Ekawati (1998) adalah Mahasiswa Jurusan Sejarah IKIP Padang . Makalah tidak diterbitkan. Jurusan Sejarah IKIP : Padang.

## 2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan terhadap masalah penelitian yang telah ditetapkan, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana keadaan militer Sumatera Barat sebelum dan setelah keluarnya kebijakan Rera?
- b. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan Rera terhadap militer di Sumatera Barat khususnya Divisi Banteng?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### Tujuan Penelitian

1. Mengkaji secara khusus tentang pelaksanaan program Rera di Sumatera Barat dan penolakan serta perlawanan yang dilakukan oleh Korps perwiranya terhadap perintah tersebut
2. Menemukan faktor-faktor khusus yang menyebabkan perbedaan reaksi pada kalangan militer eks Divisi Banteng dalam menanggapi perintah Rera yang membuat kesatuan mereka dicitkan dan banyak dari mereka harus meninggalkan kehidupan tentara kembali menjadi warga sipil

### Manfaat Penelitian

#### 1. Secara Akademis

- a. Penelitian ini akan menambah tulisan yang berkaitan dengan sejarah wilayah Sumatera Barat
- b. Penelitian ini akan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam tentang dinamika kehidupan militer dalam periode perang kemerdekaan dan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini merupakan hasil dari tugas akhir yang dibuat sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan Sejarah
- b. Kajian ini akan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang salah satu periode sejarah daerah Sumatera Barat yang seringkali kurang diperhatikan karena tertutupi oleh dua peristiwa besar yaitu PDRI dan PRRI

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Studi Relevan

Sejarah daerah Sumatera Barat merupakan topik penelitian yang menarik. Telah banyak penelitian yang mengkaji peristiwa bersejarah yang terjadi di wilayah ini. Namun, masih terdapat beberapa ruang yang masih kurang mendapatkan perhatian seperti sejarah dalam tingkatan lokal atau akar rumput seperti keberadaan kelompok militer dalam periode transisi menjelang pengakuan kedaulatan dan tahun-tahun awal dekade 1950-an. Penelitian yang telah ada cenderung pada peristiwa-peristiwa besar yang mengaitkan kelompok militer seperti PDRI dan PRRI. Padahal ada momen yang menjadi benang merah dalam perkembangan sejarah yang melibatkan kelompok militer tersebut.

Penelitian yang telah ada antara lain, tulisan Zulvia Ekawati tentang *Rasionalisasi di Bidang Militer pada Masa Kabinet Hatta* dan Alfi Syukra menulis makalah yang berjudul *Rekonstruksi-Rasionalisasi dalam Bidang Militer Program Kabinet M.Hatta tahun 1948* dan Oktaviyeni MR, mahasiswa Jurusan Sejarah UNAND menulis tentang *Pelaksanaan Rekontruksi dan Rasionalisasi*

*Dalam Bidang Militer di Sumbar 1947-1950* . Selain karya yang disebutkan diatas, ada beberapa studi lain yang terkait dengan program Rera yaitu tulisan Refiadi yang berjudul *Legiun Syahid : Integrasi Laskar dan Perkembangan Militer di Sumbar 1945-1949*.<sup>20</sup> Tulisan yang telah ada ini memutus rangkaian sejarah berdasarkan periodisasi umum sejarah Indonesia dengan menggunakan pengakuan kedaulatan sebagai batas akhir penelitiannya. Untuk daerah Sumatera Barat terdapat benang merah yang saling menghubungkan peristiwa antara sebelum pengakuan kedaulatan dan setelahnya.

Program Rera yang tidak berjalan dengan baik di Sumatera Barat pada tahun 1948, dilanjutkan kembali menjelang pengakuan kedaulatan dan tahun-tahun setelah itu. Program ini baru berakhir setelah kesatuan yang dahulunya Divisi Banteng hanya tinggal menjadi sebuah resimen dengan kekuatan beberapa batalyon saja. Fenomena inilah yang sering terlupakan selama ini. Kemudian kecendrungan lainnya adalah mengaitkan langsung penciptaan Divisi Banteng dengan pembentukan Dewan Banteng yang nantinya menjadi perlawanan PRRI. Pendapat ini ada benarnya, namun tidak bisa dijadikan patokan utama karena peristiwa PRRI bersifat kompleks. Permasalahan ini harus dipisahkan dari dua peristiwa besar itu (PDRI dan PRRI). Sehingga benang merah yang terdapat diantara sebelum dan setelah pengakuan kedaulatan akan memberikan penjelasan mengenai peranan dan dinamika kelompok militer Sumatera Barat pada periode tersebut.

---

<sup>20</sup> Refiadi. 1994. *Legiun Syahid : Integrasi Laskar dan Perkembangan Militer di Sumbar 1945-1949*. Tulisan tidak diterbitkan. (Padang : Jurusan Sejarah UNAND).

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Rera (Reorganisasi dan Rasionalisasi)

Rera adalah singkatan dari reorganisasi dan rasionalisasi. Rera adalah program pemerintah untuk merampingkan angkatan perang Indonesia ketika perang kemerdekaan. Reorganisasi artinya adalah pengorganisasian ulang kesatuan-kesatuan tentara yang ada pada masa itu. Satuan tentara dan laskar bersenjata yang terbentuk bagaikan jamur di musim hujan di masa awal kemerdekaan harus ditata ulang agar memenuhi syarat sebagai sebuah angkatan bersenjata sebuah negara. Sementara rasionalisasi adalah penyesuaian jumlah angkatan bersenjata Indonesia agar sebanding dengan luas wilayah dan efisiensi keuangan negara.<sup>21</sup> Penyesuaian luas wilayah dengan jumlah tentara disebabkan menciutnya wilayah Indonesia akibat agresi militer Belanda.

Ide tentang program ini muncul semenjak Amir Sjarifuddin menjabat sebagai perdana menteri. Rancangan awalnya diajukan oleh Z Baharoeddin, anggota seksi pertahanan KNIP yang berasal dari golongan kiri ini bertujuan untuk merangkul kalangan tentara ke pihaknya.<sup>22</sup> Pelaksanaan rencana ini dimulai dengan pembentukan TNI Masyarakat, yaitu penggabungan laskar-laskar dalam satuan tentara reguler. Sebagai tindak lanjutnya juga dibentuk Biro Perjuangan sebagai wadah untuk mengkoordinir TNI Masyarakat. Namun, rencana ini tidak terlaksana dengan baik karena Amir terpaksa meletakkan jabatannya karena

---

<sup>21</sup> Deliar Noer. 1990. *Mohammad Hatta : Biografi Politik*. Jakarta : LP3ES. (hlm:325)

<sup>22</sup> Himawan Soetanto. 1994. *Perintah Presiden Soekarno :Rebut Kembali Madiun*. Jakarta : Sinar Harapan. (hlm:59)

penolakan KNIP atas isi persetujuan Renville. Hatta yang menjadi PM (Perdana Menteri) sekaligus Menteri Pertahanan meneruskan program Rera tersebut. Pelaksanaan program ini mengalami banyak kendala dan tentangan dari berbagai pihak. Banyak faktor yang menyulitkan pelaksanaan program ini terutama bagi wilayah di luar pulau Jawa.

#### b. Divisi Banteng

Divisi Banteng adalah nama kesatuan militer yang pernah bertugas di daerah Sumatera Barat. Kesatuan ini berjuang selama kurun waktu perang kemerdekaan Indonesia. Divisi Banteng berperan besar dalam mempertahankan eksistensi PDRI ketika agresi Belanda II. Kemampuan Divisi ini membuatnya diakui sebagai salah satu kekuatan tempur terbaik di Sumatera. Pengakuan ini juga datang dari pasukan-pasukan Belanda.

Tentara di Sumatera Barat ini secara organisatoris dinamakan sebagai Divisi III TKR Sumatera yang meliputi daerah Sumatera Barat dan Riau. Divisi ini dipimpin oleh Kolonel Dahlan Djambek dan berkedudukan di Bukittinggi. Keberadaan tentara Indonesia mengalami perubahan-perubahan dalam rangka perbaikan di berbagai sektor. Pada 25 Januari 1946 TKR diubah menjadi TRI lewat penetapan pemerintah.<sup>23</sup>

Perubahan mendasar dalam ketentaraan Indonesia terjadi pada tanggal 3 Juni 1947 dengan diubahnya nama TRI menjadi TNI. Meski terjadi beberapa perubahan setelah itu, nama Divisi Banteng tetap digunakan oleh kesatuan ini.

---

<sup>23</sup> Fatimah Enar, dkk. 1978. *Sumatera Barat 1945-1949*. Bukittinggi : Grafika. (hlm:59)

Divisi IX Banteng di pimpin oleh Letkol Ismael Lengah, salah seorang pendiri BKR dan juga eks anggota Giyugun. Divisi inilah tulang punggung kekuatan militer Indonesia di Sumatera Barat dalam menghadapi agresi militer Belanda I dan II.

Divisi Banteng bertugas hingga berakhirnya perang kemerdekaan dan kemudian di likuidasi. Penciutan Divisi Banteng tidak hanya sebagai langkah dalam mereorganisasi tentara Indonesia dalam menghadapi pembentukan RIS setelah KMB dan pengakuan kedaulatan. Hal ini disebabkan oleh pembangkangan oleh para perwira-perwira mereka baik dalam tingkatan Komandemen Sumatera maupun Divisi Banteng sendiri.

Pembangkangan inilah yang diperkirakan sebagai salah satu alasan penghapusan Komando Divisi Banteng dan diciutkannya kesatuan menjadi sebuah brigade. Dari tiga Divisi yang ada di Sumatera, hanya Divisi Banteng yang dihapuskan komandonya. Kesatuan ini secara resmi mengakhiri tugasnya pada November 1949 dengan dibentuknya satuan baru yaitu Komando Subteritorial IX Sumatera Barat dengan menjadi satu brigade yaitu Brigade EE Banteng yang berkekuatan 4 batalyon dan dipimpin oleh Kolonel Dahlan Djambek.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Mestika Zed. 2005. *Giyugun : Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera*. Jakarta : LP3ES. (hlm:188)

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sejarah deskriptif yang melalui empat tahapan seperti penelitian sejarah pada umumnya. Keempat tahap itu adalah heuristik, kritik sumber, analisis-sintesis dan interpretasi, serta terakhir historiografi. Sesuai dengan tema, fokus dan juga batasan masalah yang telah ditentukan maka akan dilakukan empat tahap sebagai dijelaskan berikut ini.

Pertama, dilakukan kegiatan **heuristik** atau mengumpulkan sumber-sumber dan data sejarah.<sup>25</sup> Sumber dan data yang terkait dengan permasalahan baik primer maupun sekunder. Penelitian ini membatasi pada gejala yang terjadi pada golongan elit militer Sumatera Barat. Sumber primer itu bisa didapatkan dengan bantuan Dewan Harian Daerah (DHD) Sumatera Barat. Hal itu akan berupa catatan-catatan harian, memoar atau kumpulan tulisan yang tidak diterbitkan. Kemudian, arsip-arsip terkait dengan peristiwa ini yang terdapat di kantor kearsipan Sumatera Barat. selain dokumen-dokumen yang ada, penulis juga akan melakukan wawancara terhadap para veteran pejuang kemerdekaan Indonesia di wilayah Sumatera Barat yang masih hidup. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan kesaksian langsung dari anggota kelompok ini mengenai tanggapan mereka terhadap program Rera yang telah menghancurkan-leburkan kesatuan tentara yang sangat dibanggakan saat perang kemerdekaan.

---

<sup>25</sup> Mestika Zed. 1999. *Metodologi Sejarah*. Jur. Sejarah FIS UNP. ( hlm:36)

Penelitian ini lebih menekankan kepada studi kepustakaan. Oleh karena itu penggunaan sumber sekunder menjadi lebih dominan. Sumber sekunder yang diutamakan adalah biografi tokoh dan elit militer yang pernah bertugas di Sumatera Barat. Sejauh ini telah ada biografi dari Ahmad Husein, H.C Israr, Sebastian Tanamas dan lainnya. Selain itu juga buku-buku karya akademisi, baik peneliti asing maupun sejarawan dalam negeri.

Kedua, **kritik sumber**. Sumber dan data yang telah didapatkan sebelumnya harus diuji kebenarannya dengan melakukan kritik sumber. Kritik ini terdiri atas dua hal, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah pengujian terhadap otentisitas (keaslian) material sumber sejarah sedang kritik internal adalah untuk menguji kesahihan (reabilitas) isi informasi yang terdapat didalamnya. Kritik ini akan dilakukan terhadap semua sumber atau data yang telah didapatkan. Tujuan dari kedua kritik ini adalah agar dalam penelitian, sumber-sumber yang telah didapatkan tidak begitu saja diterima.<sup>26</sup>

Tahap ketiga yang dilakukan adalah **analisis-sintesis** dan **interpretasi**. Analisis berarti memilah-milah sumber sejarah sehingga ditemukan informasi berupa fakta-fakta lepas. Kemudian dilakukanlah sintesis atau proses merangkaikan fakta-fakta tersebut ke dalam unit analisis yang sesuai dengan pokok persoalan penelitian.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*. (hlm:131)

<sup>27</sup> Mestika Zed. *Metodologi Sejarah*. Jurusan Sejarah FIS UNP. Padang : UNP Press. (hlm:38)

Tahap akhir dari penelitian ini adalah **historiografi** atau penulisan sejarah. Fakta-fakta yang diperoleh dan telah melalui analisis-sintesis dan interpretasi sebelumnya kemudian dituliskan. Dengan bantuan tahapan-tahapan penelitian seperti diatas dapat diharapkan penelitian dengan judul **“Program Rera dan Likuidasi Divisi Banteng : Analisis Terhadap Keroncangan Militer di Sumatera Barat (1948-1950)”** menjadi lebih terstruktur.